

GUNTINGAN BERITA

RODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	KOMPAS	50	09-08-2002

Tiba-tiba Teringat Gus Dur

MEMANG benar, selalu orang mengatakan bahwa bukan tokoh yang melahirkan sejarah, tetapi sebaliknya sejarahlah yang melahirkan tokoh. Cuma saja saat memandang pengelolaan Blok Coastal Plains Pekanbaru (Blok CPP) masa mendatang, ingatan tidak dapat dilupakan dari sebuah sosok, yakni KH Abdurrahman Wahid atau akrab dipanggil Gus Dur. Melihat beberapa sumurnya yang tegang, jalan lurus tak berbelok, dan orang-orang tampak bergegas di sana-sini—semuanya dalam areal Blok CPP—tiba-tiba wajah Gus Dur menyeruak di antara tumpukan data.

Apalagi mengingat permasalahannya yang selalu kontroversial, berselindung di balik kata-kata, bahkan tak jarang membantah kembali apa-apa yang diucapkannya, kaitan antara Blok CPP dan Gus Dur terasa begitu akrab. Menyadari posisi sekarang, tak lagi menjadi Presiden, kaitan tersebut seperti membentangkan dirinya sebagai suatu catatan sejarah yang tidak saja penting bagi Riau, tetapi bagi nasional bahkan internasional karena soal minyak bisa menjadi berbagai macam isu hubungan antarbangsa.

Siang itu, Sabtu, 29 April 2001, memang agak panas sebagaimana biasanya suhu Pekanbaru. Presiden Abdurrahman Wahid duduk di muka, diikuti Menteri Agama Tolchah Hasan, Menhankam Surjadi Soedirdja, Gubernur Riau Saleh Djasit SH, dan Ketua DPRD Riau Chaidir MM. Paling kanan dalam deretan itu, duduk mantap mantan Menteri Dalam Negeri yang anak jati Riau, Syarwan Hamid. Sebelumnya, Gus Dur sempat beberapa kali menyebut nama Syarwan sebagai orang yang tak puas dengan keadaan.

Bertatap muka dengan tokoh masyarakat Riau itu, Gus Dur kemudian berbicara banyak hal. Tetapi paling penting adalah bagaimana ia berjanji akan menyerahkan pengelolaan Blok CPP kepada pemerintah di daerah yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Selama ini, urusan minyak adalah urusan pemerintah pusat melalui Pertamina yang langsung melakukan kontrak kerja bagi hasil kepada kontraktor asing mau-

pun nasional tanpa sedikit pun melibatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten.

"Kalau memang benar-benar bisa bersaing (secara teknis—Red) pemerintah pusat akan memberi garansi untuk itu. Kalau tanda tangan Menkeu tidak diterima, Presiden yang menandatangani. Biar saya mengemis-ngemis di luar negeri," kata Presiden Abdurrahman Wahid waktu itu. (*Kompas*, Minggu, 30 April 2001)

Gus Dur dalam kesempatan itu mengaku bahwa selama ini kekayaan alam Riau sebagian besar "dilarikan" hanya untuk kepentingan pusat. Untuk itu memang perlu didialogkan terus-menerus. Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa tidak semua keinginan daerah dapat dilaksanakan dengan sekejap mata karena menyangkut perundang-undangan. "Jadi, kita perlu bersabar," katanya sembari mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Riau yang dapat menahan diri walaupun daerahnya selama ini diperlakukan secara tidak adil.

Tak ada tepuk tangan bergemuruh, tak ada luapan kegembiraan usai Gus Dur mengucapkan janjinya. Tetapi, dapat ditebak bahwa dalam hati beberapa orang yang hadir pada acara tersebut mengatakan, janji itu tinggal janji dan masyarakat Riau bersiap-siap untuk mendengarkan ralat dari Gus Dur. Mungkin tidak langsung, tetapi ralat tersebut akan berisi retorika yang memilikun seperti selalu dilakukan Gus Dur.

◆◆◆

MESKIPUN demikian, pernyataan Gus Dur itu dijadikan titik tolak babak baru dari perjuangan Riau memperoleh hak-hak yang lebih konkret dari hasil minyak buminya. Banyak sekali nama yang dapat disebut dari perjuangan ini, tetapi tidak sedikit orang Riau dapat mengatakan bahwa baru dalam perjuangan Blok CPP masyarakat Riau bersatu padu dengan amat eratnyanya. Sementara Pertamina terlihat menyediakan perangkat hukum yang memungkinkan daerah menanganiladang minyak.

Berbagai sisi mata Riau mengintai. Tetapi kemudian diketahui bahwa masa kontrak kerja CPI yang semula

berakhir tanggal 8 Agustus 2001 diperpanjang. Berbagai komponen masyarakat bergabung untuk melakukan tindakan dalam payung yang mereka namakan Aliansi Rakyat untuk Blok CPP (Aruk) di bawah pimpinan Al Azhar. Mereka bahkan memberi ultimatum kepada Presiden yang waktu itu sudah beralih dari tangan Gus Dur ke Megawati, untuk berpihak kepada mereka dalam waktu 3 x 24 jam. Jika tidak, semua instalasi perminyakan akan diblokir.

Pemerintah pusat menyambut ultimatum tersebut dengan dialog intensif. Jika kemudian perpanjangan kontrak selama setahun diterima, CPI harus memberikan beberapa kompensasi seperti pemagangan karyawan dan meletakkan upaya pengembangan masyarakat pada keuntungan, bukan pada biaya produksi. Berbagai persiapan dilakukan untuk masanya, pengelolaan Blok CPP benar-benar ditangani oleh daerah.

Patut diakui, bulan madu memang harus berakhir. Kekompakan masyarakat Riau pada gilirannya surut ketika pengelolaan hendak ditancapkan di Blok CPP. Setidaknya tidaknya hubungan antara Pemerintah Kabupaten Siak dan Provinsi Riau terasa tegang karena masing-masing meletakkan haknya. Dengan alasan bahwa sebagian besar wilayah Blok CPP berada di Siak, kabupaten itu merasa harus memiliki saham minimal 70 persen dalam PT BSP, sedangkan Provinsi Riau meminta saham 40 persen, disusul 40 persen untuk Siak, dan 20 persen untuk kabupaten lain.

Berbagai isu diterapkan, berbagai intrik dijalankan, termasuk soal keterlibatan Pertamina dalam pengelolaan Blok CPP bersama PT BSP. Bahkan, beberapa hari terakhir dikabarkan bahwa Riau meminta hak pengelolaan itu ditangguhkan. "Padahal, soal saham itu kan soal kita," kata Bupati Siak Arwis AS SH. "Karena itu, penangguhan tak diperlukan. Terima saja dulu, nanti kita bicarakan sesama kita, kembali mewujudkan kebersamaan seperti semula," timpal seorang tokoh masyarakat Riau, Prof Suwardi MS.

Ya, benar Pakai istilah Gus Dur, "Gitu aja, kok repot." (ru)